

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA-135.04.2.692074/2025**

A. Dasar Hukum :

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
  2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
  3. Provinsi : (28) MALUKU UTARA
  4. Kode>Nama Satker : (692074) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
- Sebesar :Rp. 2.234.412.000,00 ( Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ratus Dua Belas Ribu RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.234.412.000,00

Rp. 2.234.412.000,00

C. Sumber Dana Berasal Dari:

- |                               |     |                  |                                |     |      |
|-------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|-----|------|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 0,00             | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0,00 |
| 2. PNBPNBPN TA Berjalan       | Rp. | 2.234.412.000,00 | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0,00 |
|                               |     |                  | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0,00 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0,00             | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0,00 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0,00             | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0,00 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0,00             | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0,00 |
|                               |     |                  | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0,00 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN Ternate (062) Rp. 2.234.412.000,00

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.04.2.692074/2025  
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (28) MALUKU UTARA  
Kode / Nama Satker : (692074) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman IA.1

---

Jakarta Selatan, 2 Desember 2024  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.04.2.692074/2025  
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga: (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (28) MALUKU UTARA  
Kode>Nama Satker : (692074) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman IB.1

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.234.412.000,00	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
1. Rupiah Murni	Rp.	0,00			(2) RPLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
2. PNBP	Rp.	2.234.412.000,00		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00			(2) RHLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0,00		
5. Hibah Langsung	Rp.	0,00		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0,00		
6. SBSN PBS	Rp.	0,00		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0,00		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0,00		

2. Rincian Pinjaman/Hibah :

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.04.2.692074/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**

Kementerian Negara / Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (28) MALUKU UTARA  
Kode / Nama Satker : (692074) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA  
Kewenangan : (KD) KANTOR DAERAH

Halaman II.1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
692074	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA	-	2.234.412,00	-	-	-	2.234.412,00		
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.234.412,00	-	-	-	2.234.412,00		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.234.412,00	-	-	-	2.234.412,00		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya ( 28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE )	-	1.181.966,00	-	-	-	1.181.966,00	28.51	
04	PNBP	-	1.181.966,00	-	-	-	1.181.966,00	062@	RM
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga ( 28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE )	-	26.970,00	-	-	-	26.970,00	28.51	
04	PNBP	-	26.970,00	-	-	-	26.970,00	062@	RM
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga ( 28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE )	-	1.025.476,00	-	-	-	1.025.476,00	28.51	
04	PNBP	-	1.025.476,00	-	-	-	1.025.476,00	062@	RM
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>2.234.412,00</b>	-	-	-	<b>2.234.412,00</b>		

Jakarta Selatan, 2 Desember 2024  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

WIDODO



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.04.2.692074/2025  
IV A. B L O K I R**

Kementerian Negara / Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [28] MALUKU UTARA  
Kode / Nama Satker : [692074] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N
<b>692074</b>	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA</b>		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNP) 1.530,00
	<i>Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 692.233,00</i>		Catatan
	52 BELANJA BARANG DAN Rp. 692.233,00		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 765,00</i>
<b>135.04.BF</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
<b>7110</b>	<b>Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah</b>		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
<b>7110.BAH</b>	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>	<b>7110.BIC</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PNP) 560.790,00		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PNP) 390.278,00
	Catatan		Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 280.395,00</i>		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 195.139,00</i>
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNP) 5.440,00		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNP) 3.060,00
	Catatan		Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 2.720,00</i>		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 1.530,00</i>
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (PNP) 198.925,00		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (PNP) 201.998,00
	Catatan		Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 99.465,00</i>		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 100.999,00</i>
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
<b>7110.BCB</b>	<b>Perkara Hukum Lembaga</b>		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PNP) 22.440,00		
	Catatan		
	<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 11.220,00</i>		
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		

Jakarta Selatan, 2 Desember 2024  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

**WIDODO**

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.04.2.692074/2025  
IV B. C A T A T A N

Kementerian Negara / Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [28] MALUKU UTARA  
Kode / Nama Satker : [692074] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta Selatan, 2 Desember 2024  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

WIDODO